



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG SATRIO PRAKOSA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **209446**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.430.074.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 254.726.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 254.760.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/150 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 357.588.000
4. Tanah Seluas 748 m2 di KLATEN, WARISAN Rp. 563.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 341.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MPNP/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, MAZDA 2 SDN 1.5L R AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA X1HO2N35M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B3B A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 95.122.011**F. HARTA LAINNYA** Rp. 59.220.150

Sub Total Rp. 1.993.916.161

III. HUTANG Rp. 299.367.584



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.694.548.577

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.